

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Dari Media



BPK Perwakilan
Provinsi Gorontalo

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Tahun

2	0	2	0
---	---	---	---

Harian Umum

Online

Provinsi/Kabupaten/Kota



PENYERAHAN LHT, BPK RI untuk Pemda Bonbol saat berlangsung di Auditorium BPK RI, Jumat (18/12) kemarin. foto (riel/rg)

BPK Temukan Masalah di Pemprov dan Pohuwato

GORONTALO (RAGORO) -

Di luar belanja penanganan Covid-10, BPK menemukan 3 hal belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja modal tahun anggaran 2020 Januari-Oktober, pada pemerintah provinsi Gorontalo bermasalah. Tiga hal tersebut, seperti diungkapkan oleh kepala BPK RI Dwi Sabardiana, perlu mendapat perhatian Pemprov, yakni pertanggung jawaban belanja barang dan jasa tidak sesuai kondisi nyata pada 19 organisasi perangkat daerah sebesar Rp580,72 juta.

Kemudian kekurangan volum pada pelaksanaan kegiatan penyediaan rumah hunian layak bagi masyarakat miskin Rp179,72 juta, serta kekurangan volume atas pekerjaan belanja modal pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dan dinas perikanan dan kelautan Rp487,57 juta.

POHUWATO

Dan berdasarkan pemeriksaan BPK atas pengelolaan SPBE menunjukkan adanya permasalahan yang dapat mempengaruhi efektivitas pemerintah tahun anggaran 2019/2020 (semester 1) pada pemerintah kabupaten Pohuwato dan instansi terkait lainnya di Marisa. Permasalahan tersebut antara lain, belum sepenuhnya menyediakan jaringan intra pemerintah yang memadai untuk mendukung penerapan dan pengembangan SPBE. Belum sepenuhnya merencanakan, mengembangkan, dan memanfaatkan aplikasi untuk mendukung penerapan SPBE dan belum melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE yang terencana dan periodik. (riel)